

## Meneguhkan Pancasila sebagai Ideologi Negara, Membumikan Pancasila untuk Kelangsungan Hidup Bangsa Indonesia

Asep Mahpudz

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
FKIP Universitas Tadulako, Palu  
Pos-el: asepmahpudz@gmail.com

### Abstrak

Nilai-nilai Pancasila penting untuk diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara oleh setiap warga-negara Indonesia. Sampai saat ini nilai-nilai keagamaan yang kuat menjadi landasan moral kehidupan Bangsa Indonesia. Fitrah manusia sangat dihormati dan ditempatkan sesuai kodrat sebagai Mahluk Ciptaan Tuhan YME. Dengan kemajemukan yang dimiliki, bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat heterogen. Di Indonesia pernah dikenal mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), kemudian diganti menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dan saat ini dikenal dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di persekolahan. Di Pendidikan Tinggi dikenal ada mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Model pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dan di perguruan tinggi memiliki perbedaan yang signifikan. Pengembangan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila perlu dibangun dan terus diinternalisasikan kepada segenap warganegara Indonesia karena tantangan yang dihadapi sekarang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri semakin tinggi. Penting diperhatikan aspek proses pendidikan bagi generasi muda dalam menumbuhkan kesadaran terhadap nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila yang dianut agar tidak dilupakan.

**Kata kunci :** Nilai-nilai Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, model pembelajaran

### Abstract

*The values of Pancasila are important to be practiced in the life of society, nation and state by every Indonesian citizen. Until now strong religious values become the moral foundation of the life of the Indonesian nation. Human nature is highly respected and placed according to nature as Creator of God Almighty God. With its plurality, the Indonesian nation has a very heterogeneous cultural wealth. In Indonesia has been known subjects of Moral Education Pancasila (PMP), then changed to Education Pancasila and Citizenship (PPKn), and currently known as Citizenship Education (Civics) in school. In Higher Education there are known courses of Pancasila Education and Citizenship Education. The learning model of Pancasila education in schools and in colleges has a significant difference. The development of national and state life awareness based on the values of Pancasila needs to be built and kept internalized to all Indonesian citizens because the challenges faced now, both from domestic and abroad increasingly high. It is important to consider the aspect of the education process for the young generation in raising awareness of the values contained in the Pancasila that is adhered to not be forgotten.*

**Keywords:** Pancasila values, civic education, learning model

### Pendahuluan

Sejak pertengahan tahun 1998 sampai saat ini, sangat dirasakan bahwa pembahasan tentang Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan di Indonesia, sangat jarang dilakukan. Bahkan mungkin banyak yang merasa malu dan risih jika membicarakan Pancasila, karena khawatir akan dianggap dan dikelompokkan sebagai pendukung orde Baru. Pasca berakhirnya pemerintahan masa Orde Baru, sangat dirasakan bahwa pembahasan Pancasila mengalami kemerosotan yang signifikan, kata pancasila sekedar dilafalkan pada upacara hari senin di sekolah, peringatan hari besar RI, dan setahun sekali di awal bulan Juni, selebihnya Pancasila nyaris dilupakan orang.

Pancasila sebagai dasar Negara seharusnya dapat lebih dipahami oleh segenap rakyat Indonesia, dan

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diyakini sebagai dasar/pondasi bagi bangsa ini dalam segala penyelenggaraan ketatanegaraan. Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ini sangatlah penting sebagai nilai yang perlu diamalkan dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Anis Ibrahim (2010) menu-liskan bahwa...pada tahun 1998 di tengah kegandrungan reformasi yang sedang bergulir, bangsa Indonesia melalui MPR melakukan evaluasi dan menyimpulkan bahwa Penataran P4 telah gagal. Kemudian Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 dicabut melalui Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Setelah terbitnya Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tersebut, untuk saat ini kedudukan

Pancasila adalah sebagai asas/dasar negara. Hal ini jelas dan tegas termaktub dalam Pasal 1 Ketetapan MPR tersebut yang berbunyi sebagai berikut: “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara”.

Dalam perspektif ini, kini akan menjadi pembahasan dan diskusi menyangkut tindak lanjut implementasi Pancasila sebagai dasar Negara, setidaknya terungkap dalam pertanyaan, bagaimana bangsa Indonesia harus melaksanakan Pancasila secara konsisten padahal tidak ada penjelasan konseptual maupun yuridis konstitusionalnya?. Tidak adanya konsep yang menjadi pedoman dalam memahami dan melaksanakan Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bermasyarakat Indonesia dapat menimbulkan kerumitan. Apakah hanya dengan menegaskan Pancasila sebagai dasar negara melalui sebuah Ketetapan MPR berarti Pancasila akan mampu menjadi pedoman menyelesaikan berbagai persoalan negara, bangsa, dan kemasyarakatan?. Jawabannya pasti tidak demikian. Selayaknya hal ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mampu memberikan rumusan konseptual dan bahkan operasional yang sesuai dengan nilai dan semangat Pancasila sebagai dasar negara tersebut.

### **Kedudukan dan Posisi Pancasila sebagai Ideologi Negara**

Kedudukan dan posisi Pancasila, bagi Negara Republik Indonesia merupakan Dasar Negara, ideologi, pandangan dan falsafah hidup berbangsa. Hal ini menjadi pedoman dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan cita-cita yang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kebenaran nilai-nilai Pancasila yang diyakini selama ini, merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa dan memiliki nilai dasar yang diakui secara universal, serta tidak akan berubah sesuai dengan dinamika jaman. (Muhtarom, 2010; Widisuseno, 2014).

Sampai saat ini kehidupan Bangsa Indonesia diwarnai dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat sebagai landasan moral, dan sangat menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sesuai dengan keragaman budaya yang dimiliki. Fitrah manusia sangat dihormati dan ditempatkan sebagai Mahluk Ciptaan Tuhan YME. Dengan kemajemukan yang dimiliki, bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat heterogen. Winataputra (2012) mengemukakan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila selayaknya menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beliau mengemukakan bahwa sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, memuat pengakuan eksplisit akan eksis-

tensi Tuhan sebagai sumber Pencipta sekaligus memperlihatkan relasi esensial antara yang mencipta dan dicipta. Dalam hubungan dan relasi sosial, terbangun iktiar untuk saling menghormati dan mau bekerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, serta kebebasan memeluk agama, tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki makna bahwa sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang sopan dan susila nilai. Dengan demikian setiap manusia dan warga Indonesia selayaknya mengakui atas persamaan hak dan kewajiban, saling mencintai, tenggangrasa, tidak semena-mena terhadap orang lain. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan Beradab. Sila Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, berarti bahwa warga Negara Indonesia diharapkan aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan. Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung arti bahwa keadilan berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materil maupun spiritual.

Muladi (2006) berpandangan bahwa dalam kehidupan suatu negara, apa yang dinamakan proklamasi kemerdekaan (*declaration of independence*), pembukaan UUD, ideologi dan konstitusi secara komplementer selalu merupakan “cornerstones” dalam mengendalikan kehidupan bernegara. Pancasila secara utuh harus dilihat sebagai suatu “*national guidelines*”, sebagai “*national standard, norm and principles*” yang sekaligus memuat “*human rights and human responsibilities*”. Apabila Pancasila disepakati sebagai Ideologi Negara, maka Alfian (1981), mengemukakan sebagai ideologi harus dilihat sebagai sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam tentang kebenaran dan keadilan dalam kehidupan bersama di suatu masyarakat. Ideologi mencerminkan tatanan nilai yang paling mendasar dari sistem nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, ideologi merupakan referensi dari perkembangan nilai di Indonesia.

Pada selanjutnya Alfian (1981) merumuskan dimensi ideologi yaitu: (1) dimensi realitas, (2) dimensi idealis, (3) dimensi fleksibel. Dalam pemahaman Alfian, suatu ideologi harus memiliki ketiga dimensi tersebut. Ideologi memiliki cakupan yang komprehensif, yaitu bisa memayungi berbagai kepentingan dan dinamika sosial karena Ideologi merupakan himpunan nilai-nilai, ide-ide atau norma-norma, dan kepercayaan dari seseorang atau kelompok orang. Jadi ideologi merupakan referensi bagi seseorang atau kelompok dalam merespons masalah dan dalam bersikap. (Miriam Budiardjo, 2008)

Selain sebagai Ideologi, Pancasila juga sebagai falsafah Negara Indonesia. Pancasila menganut asas

keselarasan dan kesetaraan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi dan dalam hubungan manusia dengan masyarakat. Apabila menyimak Sila Kelima Pancasila tentang Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Notonagoro (1995) dalam Arvie Johan (2011) berpendapat bahwa di dalam keadilan sosial tercakup pemeliharaan kepentingan umum negara sebagai negara, kepentingan umum para warga negara bersama, kepentingan bersama dan kepentingan khusus dari para warga negara perseorangan, keluarga, suku bangsa dan setiap golongan warga Negara.

Dalam perspektif ini, dapat dikaji bahwa Pancasila sebagai Ideologi berbeda dengan filsafat. Pancasila sebagai Ideologi memang mengandung nilai-nilai dan pengetahuan filosofis, namun berlaku sebagai keyakinan yang normatif. Sebaliknya Pancasila sebagai filsafat merupakan rangkaian pengetahuan ilmiah yang disusun secara sistematis tentang kenyataan-kenyataan hidup, termasuk kenyataan hidup bermasyarakat dan bernegara. Dalam pandangan filsafat, pemikiran-pemikiran reflektif yang harus ditanggapi bukan dengan dogmatis, dan memerlukan sikap yang kritis rasional. Oleh karena itu, Pancasila sebagai falsafah Negara harus selalu terbuka terhadap kritikan dan tidak bersifat eksklusif.

Berdasarkan hal demikian, filsafat sangat berguna bagi ideologi dan proses penjabaran ideologis. Melalui pendekatan filosofis dikaji secara mendasar hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, bangsa, dan negara. Refleksi filosofis membuat Pancasila sebagai ideologi Negara tetap terbuka, tidak eksklusif, dan tidak totaliter, bahkan sebaliknya menjadi dinamis dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan melalui interpretasinya yang objektif, rasional, dan ilmiah. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi Negara menjadi tetap relevan. (Poespowardojo, 1992). Hakikat Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara dan tujuan negara yang mengandung nilai-nilai luhur, nilai dasar, nilai praktis, nilai instrumental dan nilai teknik. Hal ini kemudian tertuang dalam falsafah Pancasila dalam bentuk lima sila yang saat ini kita kenal. Secara historis, Pancasila merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia terutama dimasa sebelum kemerdekaan yang kemudian dirumuskan sebagai dasar filsafat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam pemahaman demikian, maka Pandangan tentang Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni: 1) kelompok material, yaitu Pancasila merupakan filsafat hidup bangsa Indonesia yang dapat dihayati sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sarana tujuan hidup bangsa, pandangan serta pedoman hidup bangsa; dan 2) kelompok formal, yakni Pancasila sebagai sumber dari

segala sumber hukum negara Indonesia dan juga perjanjian luhur bangsa Indonesia dalam bernegara (Noor Ms Bakry, 1994).

Dalam perspektif menempatkan Pancasila sebagai Ideologi Negara, maka dapat dilihat dalam kawasan filsafat ilmu baik dari segi ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Secara ontologis, hakikat ilmu pengetahuan merupakan aktivitas manusia Indonesia yang tidak mengenal titik henti dalam upayanya untuk mencari dan menemukan kebenaran dan kenyataan yang utuh dalam dimensinya sebagai masyarakat, sebagai proses, dan sebagai produk. Secara epistemologis, berarti Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijadikan metode berpikir (dijadikan dasar dan arah berpikir) dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, yang parameternya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Secara aksiologis, kemanfaatan dan efek pengembangan ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan ideal Pancasila dan secara positif mendukung atau mewujudkan nilai-nilai ideal Pancasila. Hal inilah yang kemudian menjadi landasan penting perumusan formulasi Pancasila dijadikan sebagai salah satu bagian dari kurikulum pendidikan di Indonesia pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

Nilai-nilai luhur, historik dan sebagainya yang terkandung di dalam Pancasila harus ditransfer secara terus menerus dari generasi ke generasi, sebab di dalamnya terkandung falsafah bangsa, aturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pandangan Harian Kompas, perlu langkah menjadikan bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai bidang yang mesti dimaksimalkan dalam mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga akan tercipta pribadi-pribadi dan masyarakat pancasilais. Dalam dimensi ini gagasan harian Kompas menunjukkan komprehensifitasnya dalam menggagas upaya-upaya mereaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. (Wahyudi, 2011).

Pada Sistem Pendidikan Indonesia, pernah dikenal pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) kemudian diganti menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sampai akhirnya saat ini dikenal dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di persekolahan. Sedangkan di Pendidikan Tinggi dikenal ada mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Model pembelajaran pendidikan Pancasila di kalangan pelajar dan mahasiswa tentunya memiliki perbedaan yang signifikan.

### **Strategi Internalisasi dan Pembudayaan Pancasila**

Pancasila pada hakikatnya tidak hanya dipandang sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila dapat

pula dilihat sebagai sebuah sistem nilai bangsa Indonesia, sebagai pedoman bermoral, ber hukum dan berpolitik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai Dasar Negara, Pancasila merupakan ideologi, pandangan dan falsafah hidup yang harus dipedomani bangsa Indonesia dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa dan memiliki nilai dasar yang diakui secara universal dan tidak akan berubah oleh perjalanan waktu. (Budi Susilo Supandji, 2013). Setiandja (2006) dalam Ahmad Gunawan dan Mu'amar Ramadhan (ed) (2006) mengemukakan bahwa lima prinsip Nilai Pancasila menunjukkan ide-ide fundamental mengenai manusia dan seluruh realitas, yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan ber sumber pada watak dan kebudayaan bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai suatu sistem nilai yang digali dari nilai dan identitas bangsa yang berdasarkan atas kehidupan sosial, kultural, dan religiusitas yang beragam dan majemuk. Nilai-nilai tersebut tidak dapat dipisahkan. Kerukunan umat beragama, keberagaman etnisitas, budaya dan bahasa akan terjaga apabila kita dapat menjaga konsistensi dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Fakta kemajemukan dan multikultural dalam masyarakat harus dihormati, dilestarikan, dan dikembangkan (Aris Shofa, 2016). Oleh karena itu, saat ini sangat diperlukan penyegaran pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila untuk menangkal berjangkitnya beragam ancaman ekstremisme. Dengan menguatkan nilai-nilai ketuhanan yang berkebudayaan, kebangsaan yang berpriskemanusiaan, serta demokrasi permusyawaratan yang berorientasi keadilan sosial, Indonesia akan mampu menghadapi perkembangan baru dengan suatu visi global yang berkearifan lokal. (Yudi Latif, 2011). Tinggal masalahnya, bagaimana memperdalam pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila dan kesalingterkaitannya satu sama lain, untuk kemudian diamalkan secara konsisten di segala lapis dan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. (Yudi Latif, 2011).

Pengembangan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila perlu dibangun dan terus diinternalisasikan kepada segenap warganegara Indonesia karena tantangan yang dihadapi sekarang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri semakin tinggi. Dalam pandangan saya, penting diperhatikan aspek proses pendidikan bagi generasi muda dalam menumbuhkan kesadaran terhadap nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila yang dianut agar tidak dilupakan. Saat ini dan ke depan memungkinkan manusia berhubungan dan berkomunikasi setiap saat tanpa batas. Di satu sisi, hal ini dapat memberikan kontribusi positif bagi proses pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pada sisi lainnya, teknologi informasi dapat digunakan sebagai sarana melemahkan sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan. (Mahpudiz, 2013)

Dalam konteks ini, maka upaya sistemik dan sistematis melalui pendidikan merupakan langkah strategis untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila bagi segenap warga Negara Indonesia di era sekarang. Nilai-nilai Pancasila sebaiknya dijabarkan dalam bentuk contoh-contoh perilaku yang dapat diamati dalam kehidupan yang realita masyarakat. Bagi generasi muda yang saat ini menjadi siswa di tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah, selayaknya nilai-nilai Pancasila dapat disajikan dalam wujud yang meyakinkan serta konkret dalam bentuk kasus atau isu yang dapat dianalisis sebagai ideologi Negara dan memiliki nilai-nilai luhur bangsa sehingga mampu menjadi bekal yang tangguh bagi segenap warga Negara Indonesia dalam menghadapi setiap ancaman dan gangguan yang dapat membahayakan keamanan dan kelangsungan, hidup bangsa, tanpa mengenal menyerah. (Mahpudiz, 2013).

Pada tataran operasional, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi politik, organisasi masyarakat, dosen dan guru merupakan pelaksana dalam upaya revitalisasi nilai Pancasila yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan pembekalan yang memadai terkait nilai – nilai Pancasila, komponen bangsa tersebut memainkan peran sebagai agen perubahan (*agent of change*) mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan pemukiman hingga lingkungan kerja. Pendidikan formal, informal maupun non formal yang dimulai dari lingkungan keluarga hingga lingkungan pendidikan, merupakan sarana yang efektif untuk menanamkan pemahaman atas nilai-nilai empat pilar wawasan kebangsaan. (Soepandji, 2013). Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa sebagai rangkaian upaya yang terstruktur, upaya pada tataran operasional akan bersifat praktis implementatif. Pelibatan lembaga-lembaga tersebut untuk menghasilkan peraturan perundangan yang memperkuat upaya-upaya revitalisasi Pancasila secara demokratis dan bermartabat. Upaya yang bersifat praktis ditujukan untuk mendukung upaya-upaya politis melalui kegiatan-kegiatan seperti pendidikan, penyuluhan dan *training of trainer* (TOT) tenaga penyuluh dengan melibatkan peran aktif para pemangku kepentingan. Sedangkan upaya yang bersifat operasional dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Hal ini dilakukan mengingat lembaga pendidikan merupakan ujung tombak pembentukan watak dan karakter bangsa, khususnya generasi muda yang efektif.

Proses pendidikan perlu diintegrasikan pula dengan upaya penanaman nilai-nilai Pancasila disamping pengembangan pengetahuan secara akademis. Proses pendidikan pada masa depan selayaknya dibangun atas dasar kebutuhan belajar peserta didik

agar memiliki dasar kemampuan untuk menjalani kehidupan di masyarakat pada masa kini dan masa depannya. (Mahpudz, 2013). Oleh karena itu, perolehan hasil pendidikan dari internalisasi nilai Pancasila yang didapat peserta didik selanjutnya berupa kemampuan yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam kehidupan sosialnya. Kemampuan beradaptasi semakin dibutuhkan pada kehidupan sosial dengan kemampuan yang dimiliki dalam ilmu pengetahuan dan kemandirian afeksi secara keseluruhan dengan didasari nilai-nilai Pancasila. Kemampuan untuk mudah beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang terus berubah fluktuatif ini akan menjadi tuntutan dari proses pendidikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila didalamnya.

Sekaitan dengan pemikiran ini, dipaparkan oleh Winataputra (2012) bahwa untuk mewujudkan tujuan pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam arti utuh dan luas, maka untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan disesuaikan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang secara utuh memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tabel 1: Aspek dan Arah Penyelenggaraan Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila di lingkup Pendidikan

Aspek	Arah Penyelenggaraan
Output	menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan kompetensi kehidupan masyarakat dalam dinamika global
Proses	penyelenggaraan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, mengungkap potensi diri peserta didik (kepribadian, keilmuan, keterampilan sosial)
Metode	Membangun hubungan antara pendidik dan peserta yang harmonis yang berdasarkan pada hubungan saling membutuhkan.

Pada aspek pembinaan nilai-nilai kepribadian, yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila akan berkaitan dengan komitmen seseorang, individu sebagai bagian dari seluruh bangsa atau masyarakat Indonesia untuk turut serta mempertahankan eksistensi bangsa dengan meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Pada aspek peningkatan pengetahuan, seseorang atau individu perlu menyadari sebagai bagian dari keseluruhan bangsa untuk mengetahui dan menyadari tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa, dan potensi yang dimiliki bangsa. Oleh karena itu, upaya pembinaan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda pada

masa sekarang selanjutnya mengutamakan pandangan dan sikap antisipatoris, berupa pembinaan kemampuan untuk memperhitungkan perkembangan yang akan terjadi di masa depan. Artinya, dibutuhkan penanaman sikap untuk siap menghadapi segala situasi baru, tantangan baru, yang belum pernah terjadi dalam kehidupan suatu masyarakat atau suatu bangsa.

Dalam konteks pengembangan kepribadian generasi muda, Mahpudz (2013) mengemukakan bahwa dalam internalisasi Nilai Pancasila dan kebudayaan nilai Pancasila agar dapat menjadi wahana strategis bagi peningkatan kompetensi generasi muda, maka setidaknya perlu dilakukan beberapa alternatif perbaikan pembelajaran, diantaranya;

*Pertama*, dalam perspektif pengorganisasian materi pendidikan, selanjutnya materi tentang nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi Negara disusun berdasarkan asas kontinuitas, urutan dan integrasi. Asas kontinuitas (*continuity*) diartikan sebagai adanya kesinambungan secara vertikal dari suatu materi ke materi selanjutnya sehingga generasi muda memiliki kesempatan luas untuk belajar dengan baik dan benar dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kependidikan. Asas urutan (*sequence*) dapat diartikan sebagai adanya keterkaitan antara satu materi dengan materi lainnya, sehingga materi pendidikan tersebut terlihat keterhubungannya (dalam perspektif proses pembelajaran). Sedangkan asas integrasi (*integration*) dapat diartikan sebagai adanya kaitan dan hubungan antara dan antar materi pendidikan satu dengan lainnya sebagai bagian keseluruhan materi pembelajaran.

*Kedua*, dibutuhkan komitmen dan rekrutmen pendidik dalam rangka Revitalisasi nilai-nilai Pancasila di era kini dan masa depan yang berdasarkan pada standar yang disepakati. Selain itu agar dapat berlangsung pertukaran informasi berkenaan dengan perkembangan model, pola, strategi pembelajaran di tiap lingkup dan jenjang pendidikan sesuai dinamika perubahan sosial.

*Ketiga*, penyelenggaraan pembelajaran nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi Negara sebaiknya dibuatkan dalam format, model pembelajaran yang terbuka dan memberi peluang bagi generasi muda untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat, berdiskusi secara intensif untuk pendalaman materi yang dikaji. Dapat dilihat dari pelaksanaan seperti demikian, jumlah peserta yang secara penuh mengikuti kegiatan, antusiasme peserta dalam pengembangan materi untuk dapat diterapkan sekaligus.

*Keempat*, Semakin penting untuk terus ditumbuhkembangkan kesadaran kebangsaan Indonesia di masa kini dalam wujud pendidikan antisipatoris. Pendidikan yang tidak sekedar mentransformasikan pengetahuan, tetapi juga memberikan pemahaman

wawasan kebangsaan, wawasan kebhinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai suatu potensi yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai perwujudan nyata nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, kebenarannya tetap diyakini oleh bangsa Indonesia, karena mampu mengimbangi dinamika dan dialektika jaman.

### Penutup

Langkah strategis yang dapat dikembangkan dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya membudayakan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi Negara perlu diarahkan untuk mengembangkan potensi kognitif, afektif dan konatif generasi muda dengan memberi penguatan pada aspek pengembangan kepribadian yang diimplementasikan dalam pengembangan pembelajaran. Proses pembelajaran yang diorientasikan pada pengembangan kepribadian yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila selanjutnya dikembangkan dalam proses pembelajaran aktif, menempatkan peserta sebagai subjek belajar, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan keleluasaan untuk prakarsa dan ide. Dengan demikian proses pembelajaran sebagai revitalisasi nilai-nilai Pancasila yang dikembangkan merupakan proses mendidik, yang didalamnya terjadi pembahasan kritis, analitis, induktif dan reflektif melalui dialog kreatif.

### Ucapan terima kasih

Pada kesempatan ini saya menghaturkan terima kasih kepada pimpinan Badan Pengkajian MPR RI dan Direktur Politeknik Palu, karena tulisan ini sempat dipresentasikan pada kegiatan FGD di Palu, 12 Oktober 2017.

### Daftar Pustaka

- Alfian. (1981). Politik, Kebudayaan, dan Manusia Indonesia, Jakarta: LP3ES,
- Aris Shofa, Abd Mu'id. (2016). Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila, JPK: *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 1, Juli 2016
- Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ibrahim, Anis. (2010). Perspektif Futuristik Pancasila Sebagai Asas/Ideologi Dalam UU Keormasan, *Jurnal Konstitusi*, Vol. III, No. 2, November 2010
- Latif, Yudi. (2011). Revitalisasi Pancasila di Tengah Dua Fundamentalisme dalam DISKURSUS, dalam DIGNITAS Volume VII Nomor 2 Tahun 2011
- Mahpudz, Asep. (2013). Peluang Bagi Guru Dalam Menginternalisasikan Nilai-Nilai Pancasila Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sesuai Tuntutan Kurikulum 2013, *Makalah* disampaikan sebagai kontribusi pemikiran untuk Seminar dan Rapat Kerja Nasional Asosiasi Profesi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan se-Indonesia (AP3Knl), dengan Tema: *Revitalisasi Nilai-nilai pancasila dan Implementasi Kurikulum PKN 2013*, di Auditorium Lt.6 Gedung FPIPS Universitas pendidikan Indonesia, Sabtu 14 Desember 2013
- Muchtarom, Moch. (2012). Strategi Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Melalui Inovasi Pembelajaran Pkn Berorientasi *Civic Knowledge, Civic Disposition*, dan *Civic Skill* di Perguruan Tinggi. *Jurnal PKN Progresif*, Vol. 7 No. 2 Desember 2012
- Muladi. (2006). Pancasila sebagai Margin of Appreciation dalam Hukum yang Hidup di Indonesia. dalam Ahmad Gunawan dan Mu'ammarr Ramadhan (ed). (2006). *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Noor Ms Bakry. (1994). *Pancasila: Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Liberty
- Poespowardojo, Soerjanto. (1992). Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama. dalam Oetoyo Oesman dan Alfian (Ed.) *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Setiardja, Gunawan. (2006). Berpikir secara Filsafati sebagai Sarana Memahami Pancasila sebagai Ideologi Maupun sebagai Dasar Negara. dalam Ahmad Gunawan dan Mu'ammarr Ramadhan (ed). (2006). *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siswanto. (2017). Aktualisasi Pancasila Sebagai Strategi Menangkal Perang Proxy di Indonesia. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, April 2017, Volume 7 Nomor 1
- Soepandji, Budi Susilo. (2012). *Revitalisasi Nilai Luhur Pancasila dalam Kehidupan Nasional*, tersedia <http://budisusilosoepondji.wordpress.com/2012/06/07/revitalisasi-nilai-luhur-pancasila-dalam-kehidupan-nasional/> (diakses 12 juni 2013)
- Suseno, Franz Magnis. (1999). *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syahrul Kirom. (2011). Filsafat Ilmu dan Arah Pengembangan Pancasila: Relevansinya dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan. *Jurnal Filsafat* Vol. 21, Nomor 2, Agustus 2011
- Wahyudi, R. Firdaus, Hasrullah, M. Iqbal Sultan. (2014). Representasi Ideologi Dalam Diskursus

Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Harian Kompas. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, Vol. 3, No. 3 Juli – September 2014

Widiuseno, Iriyanto. (2014). Azas Filosofis Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara. *Jurnal HUMANIKA* Vol. 20 No. 2 (2014)

Winataputra, Udin, (2012). Transformasi Nilai-nilai Kebangsaan Untuk Jatidiri Bangsa Indonesia: Suatu Pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan, *Makalah*, Bandung: UPI

Winataputra, Udin S. (2014). Diskursus Aktual Tentang Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam Konteks Kurikulum 2013. Bahan Diskusi dalam Semnas PKn-AP3KnI, Tahun 2014